



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 24 Oktober 2024

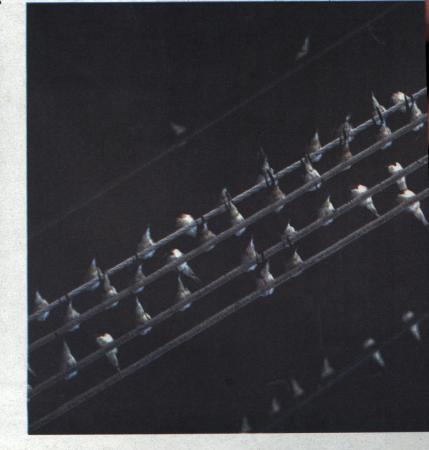
Halaman: 1



# MIRAS MARAK, PEMPROV PERTANYAKAN OSS<sup>2</sup>

Minta izin secara Online Juga Ada Verifikasi Lapangan

YOGYA - Adanya gelombang masyarakat yang resah terhadap penyalahgunaan minuman keras (miras) di DJI mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sekretaris Provinsi (Sekprov) DJI Beny Suharsono berkomunikasi dengan para petugas untuk mengetahui persyaratan pengilangan miras melalui *Online Single Submission (OSS)*. Menurut dia, harusnya tak hanya persyaratan izin yang dicek. Tapi disertai dengan pemeriksaan di lapangan secara mendekat. ■ *Baca Miras... Hal 7*



# Miras Marak, Pemprov Pertanyakan OSS

Sambungan dari hal 1

"Telaah dulu, izin melalui OSS itu memang kemudahan, dan kami hargai, namun harus dicek di lapangan," ujarnya saat menghadiri acara di Kantor DPRD DJI, Rabu (23/10).

Beny tidak mempermasalahkan izin dari OSS, selagi dilakukan pengecekan di lapangan melalui tim verifikasi. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah penerapan sesuai dengan pengajuan dalam iizin.

Hal lain yang disorotinya, selain beredar secara offline di toko fisik, terkait penjualan yang dilakukan secara online. "Makanya yang jadi masalah di samping yang (toko) permanen juga nonpermanen (*online*)," katanya.

Menurutnya, peredaran miras melalui *online* juga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan bersama dengan para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten dan kota.

Pemprov DJI telah melakukannya langkah sejak tiga minggu

yang lalu dengan mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pihak terkait hingga tingkat kabupaten/kota untuk membicarakan maraknya peredaran miras tersebut. Pihaknya lebih melihat urgensi kewenangan di masing-masing wilayah, bukan terkait saling lempar tanggung jawab.

"Justru dengan tahu kewenangan, kewajiban dan haknya (setiap daerah) supaya tidak *uncal-uncalan*," tegasnya.

Beny juga menanggapi rencana aksi Jalan Kaki Rakyat

Jogja Mengadu dengan tema Keresahan Peredaran Minuman Keras yang Semakin Mengganggu di Masyarakat. Dalam poster yang telah disebarkan, agenda tersebut dibawagangi oleh Forum Ukhwah Islamiyah (FUI) DJI yang akan dilakukan pada Jumat (25/10) di Kantor Gubernur dan DPRD DJI. Menurutnya, adanya aspirasi dari masyarakat harus dihargai. "*Wong demo aja, boleh kok*" tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DJI Imam Tauqif menambahkan pihaknya akan

melihat Peraturan Daerah (Perda) DJI tentang peredaran miras agar lebih dijalankan. DJI sudah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Selain itu, setiap kabupaten dan kota di DJI juga telah mempunyai aturan yang menge-

tur tentang peredaran miras. "Saya kira itu harus bersinergi antara provinsi dengan kabupaten dan kota dalam hal menertibkan peredaran miras. Aturan itu sudah jelas di mana yang boleh menjual dan model penjualannya," tegasnya.

Ia menyampaikan ikut khawatir apabila peredaran miras menjadi marak karena berbahaya untuk generasi masa depan. Terlebih untuk toko miras ilegal, pihaknya tegas mengatakan untuk ditutup ketika tidak sesuai dengan peraturan. "Tinggal pelaksanaanya, kami kerjasama baik dengan Satpol PP, Polres termasuk dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan," ujarnya. (oso/pr/a)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005